

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PASAR RAKYAT DI KOTA SURABAYA

Anggita Dahnelia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
dahneliaa@gmail.com

M. Kendry Widiyanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

Hasan Ismail

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
hasanismail@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

People's markets have a strategic role in the local economy, but their existence is increasingly being pushed by the development of modern markets. To answer these challenges, the Surabaya City government implements a people's market revitalization policy to increase the competitiveness of the people's market through infrastructure updates, management systems, and trader empowerment. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the people's market revitalization policy in the city of Surabaya and its impact on increasing the competitiveness of the people's market. The approach used is qualitative descriptive through interviews, observations, and documentation, as well as literature studies. The results of the study show that revitalization has a positive impact on market comfort, turnover growth, and service quality. However, other challenges still arise such as budget constraints, slow auction processes, and traders' resistance to digitalization. The success of the revitalization is highly dependent on cross-sector collaboration, market management readiness, and the adaptation of traders to change.

Keywords: *Market Revitalization, Policy Effectiveness, People's Market, Competitiveness, City of Surabaya*

ABSTRAK

Pasar rakyat memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal, namun keberadaannya semakin terdesak oleh perkembangan pasar modern. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan kebijakan revitalisasi pasar rakyat guna meningkatkan daya saing pasar rakyat melalui pembaruan infrastruktur, sistem manajemen, dan pemberdayaan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya serta dampaknya terhadap peningkatan

daya saing pasar rakyat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi berdampak positif terhadap kenyamanan pasar, pertumbuhan omzet, dan kualitas layanan. Namun, tantangan lain masih muncul seperti halnya keterbatasan anggaran, proses lelang yang lambat, dan resistensi pedagang terhadap digitalisasi. Keberhasilan revitalisasi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, kesiapan manajemen pasar, serta adaptasi pedagang terhadap perubahan.

Kata Kunci: *Revitalisasi Pasar, Efektivitas Kebijakan, Pasar Rakyat, Daya Saing, Kota Surabaya*

A. PENDAHULUAN

Pasar rakyat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perekonomian lokal yang memiliki fungsi strategis, baik sebagai pusat perdagangan tradisional maupun sebagai ruang interaksi sosial dan budaya masyarakat (Ii 2020). Dari segi ekonomi daerah, keberadaan pasar rakyat tidak hanya bertujuan untuk menyediakan akses terhadap kebutuhan pokok saja, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah (Salsabila et al. 2024). Keterlibatan langsung antara produsen dan konsumen dalam transaksi di pasar rakyat turut menjadikan pasar ini sebagai ruang ekonomi yang inklusif dan berbasis komunitas.

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya dominasi pasar modern, eksistensi pasar rakyat mulai menghadapi tantangan serius, terutama dengan adanya penurunan daya saing. Perubahan pola konsumsi kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan kenyamanan berbelanja, serta kualitas pelayanan turut menjadi faktor yang menuntut adanya transformasi terhadap pengelolaan pasar rakyat (Galuh Oktavina - 12704 2021). Menyikapi hal tersebut, pemerintah menginisiasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat yang tidak hanya berfokus pada pembaruan infrastruktur fisik saja, tetapi juga mencakup aspek manajerial, pemberdayaan pedagang, serta penguatan sistem pengelolaan pasar yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kebijakan revitalisasi pasar rakyat secara nasional telah diimplementasikan sejak tahun 2015, dengan target pembangunan dan peningkatan kualitas pasar sebanyak 5.000 pasar hingga tahun 2019. Kemudian terhitung sejak tahun 2018, tercatat sebanyak lebih dari 4.000 pasar rakyat telah mengalami revitalisasi, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas layanan, sebagaimana seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Kominfo 2019). Program revitalisasi ini tetap berjalan meskipun sempat dihadapkan pada tantangan besar, seperti halnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang sempat menghambat pada pelaksanaan program revitalisasi pasar rakyat ini, namun pemerintah tetap berkomitmen melalui integrasi teknologi digital dan pelatihan bagi para pedagang (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu 2020).

Di Kota Surabaya, kebijakan revitalisasi pasar rakyat telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, antara lain ditandai oleh meningkatnya omzet pedagang serta perbaikan kualitas pelayanan di sejumlah pasar. Pemerintah Kota

Surabaya secara aktif telah melakukan revitalisasi pada berbagai titik, seperti halnya di Pasar Keputran Utara, Pasar Kembang, Pasar Simo, Pasar Nambangan, dan Pasar Dupak Rukun (Rohmadani and Megawati 2022). Program revitalisasi ini mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan sistem manajemen pasar, perbaikan sanitasi, serta penataan lahan parkir demi menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan modern.

Sejauh ini program revitalisasi pasar telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2024 mencapai sebesar 4,93% yang mana hal ini turut didukung oleh kontribusi dari sektor perdagangan melalui kontribusi pasar rakyat, yang mana hal tersebut juga akan dijabarkan melalui gambar berikut:



Sesuai dengan data dari BPS yang menjabarkan terkait pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan III-2024, dapat disimpulkan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari peran serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga keberhasilan revitalisasi di Kota Surabaya menjadi salah satu faktor penopang yang turut memberikan kontribusi terhadap dinamika ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan adanya dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Surabaya melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di bidang Pasar Rakyat. Kebijakan tersebut mengaskan terkait pentingnya revitalisasi pasar sebagai Upaya penguatan ekonomi lokal (Nasional et al. 2020). Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menekankan terkait perlunya sistem manajemen, penerapan transaksi digital di lingkup pasar rakyat, serta peningkatan sarana prasarana yang modern dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan pasar rakyat.

Pelaksanaan kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang kerap dihadapi meliputi

keterbatasan anggaran, persoalan kepemilikan lahan, hingga keterlabatan proses lelang tender (Pasar et al. 2024). Selain itu pasca revitalisasi pasar, sejumlah pedagang juga masih dihadapkan dengan kendala lain seperti halnya beban retribusi dan sewa pasar yang mengalami peningkatan, sehingga dapat berpengaruh pada keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, hingga saat ini masih diperlukan Solusi strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik pasar pasca revitalisasi, tetapi juga pada penguatan sistem manajemen keuangan, pelatihan usaha pedagang, serta penyediaan akses sumber daya yang mendukung keberlanjutan usaha para pedagang.

Dengan adanya regulasi kebijakan seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Kota Surabaya, diharapkan berbagai kendala yang dialami dalam proses revitalisasi pasar rakyat dapat diminimalisir melalui optimalisasi pada fungsi pengawasan, peningkatan kualitas tata kelola pasar, serta kemudahan akses pembiayaan bagi pedagang. kebijakan ini juga mengatur terkait zona perdagangan dan pembatasan komoditas untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan daya saing pasar rakyat di Tengah persaingan dengan pasar modern (Nasional et al. 2020). Melihat pentingnya peran pasar rakyat dalam perekonomian lokal serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan revitalisasi, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat di Kota Surabaya, serta mengidentifikasi terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasinya.

Dinamika implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya juga tidak terlepas dari keterlibatan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, pengelola pasar, maupun komunitas pedagang yang turut berperan aktif dalam proses adaptasi terhadap perubahan pasca revitalisasi. Partisipasi aktif para pedagang dalam mengikuti pelatihan manajemen usaha serta pemanfaatan teknologi digital turut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program revitalisasi, sebagaimana terlihat pada peningkatan omzet dan kualitas layanan di sejumlah pasar yang telah direvitalisasi, seperti halnya Pasar Kembang dan Pasar Karah Baru (Rohmadani and Megawati 2022). Meskipun demikian, masih terdapat tantangan lain berupa resistansi pada sebagian pedagang terhadap perubahan sistem pengelolaan dan penerapan transaksi digital, yang menuntut adanya pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif dari pihak pemerintah maupun pengelola pasar. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan adaptasi para pelaku pasar dalam menghadapi transformasi menuju pasar rakyat yang lebih modern dan berdaya saing.

Keberhasilan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti halnya dukungan regulasi yang adaptif serta ketersediaan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah. Namun sejumlah persoalan klasik masih kerap muncul. Di antaranya adalah keterbatasan lahan, proses lelang tender yang berlarut-larut, serta beban retribusi pasca revitalisasi yang dirasakan para pedagang (Raviansyah dkk 2022). Situasi tersebut menuntut adanya

inovasi kebijakan dan penguatan koordinasi lintas sektor agar revitalisasi pasar tidak hanya berdampak pada aspek fisik semata, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas tata kelola, profesionalisme pihak pengelola pasar, serta kesejahteraan para pelaku usaha pasar.

Berdasarkan studi perbandingan dengan kota lain, seperti yang terjadi di Kota Malang menunjukkan bahwa pendekatan inovatif seperti pelatihan berkelanjutan dan digitalisasi administrasi pasar dapat mempercepat proses adaptasi pedagang terhadap perubahan, sekaligus meningkatkan daya tarik pasar rakyat sebagai pusat ekonomi dan sosial masyarakat (Rohman and Larasati 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam terkait implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya, guna merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung terwujudnya pasar rakyat yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan revitalisasi pasar rakyat merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional agar mampu beradaptasi di Tengah pesatnya perkembangan pasar modern. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan pemahaman mendalam, baik dari segi implementasi kebijakan publik maupun konsep revitalisasi secara menyeluruh. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) turut menjadi acuan utama dalam menganalisis terkait efektivitas implementasi kebijakan yang akan ditentukan melalui 6 indikator penting yang saling berkaitan dan membentuk kerangka evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang ada di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Standar dan sasaran kebijakan**
Standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan secara jelas agar mudah dipahami oleh pelaksana.
2. **Sumber daya**
Sumber daya yang mencakup dana, waktu, fasilitas, dan tenaga pelaksana sangat penting untuk menunjang keberhasilan.
3. **Karakteristik organisasi pelaksana**
Organisasi pelaksana harus memiliki struktur yang mendukung serta mampu melakukan koordinasi lintas sektor.
4. **Disposisi atau sikap pelaksana**
Sikap pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan apakah implementasi akan dijalankan dengan sungguh-sungguh atau tidak.
5. **Komunikasi antar organisasi pelaksana**
Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana harus dilakukan secara konsisten.
6. **Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik**
Faktor eksternal seperti halnya stabilitas politik, dukungan masyarakat, serta kondisi ekonomi juga turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Dalam hal revitalisasi pasar rakyat, implementasi kebijakan ini berkaitan erat dengan konsep revitalisasi yang bersifat multidimensi dan mencakup aspek fisik,

ekonomi, manajerial, hingga sosial budaya. Revitalisasi bukan hanya sekedar perbaikan pada bangunan fisik pasar, tetapi juga menyasar peningkatan kualitas layanan, pengelolaan pasar yang lebih modern, hingga pemberdayaan pedagang agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Revitalisasi yang berhasil umumnya ditandai dengan adanya peningkatan pada omzet pedagang, kebersihan dan kenyamanan pada lingkungan pasar yang baru, serta adopsi teknologi pada sistem pembayaran digital atau e-retribusi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pasar rakyat memiliki peran ganda sebagai pusat ekonomi sekaligus ruang interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan revitalisasi yang diterapkan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus menyeluruh dan mempertimbangkan pada kondisi sosial ekonomi setempat.

Kebijakan revitalisasi pasar di Kota Surabaya dijalankan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 yang menekankan pada pentingnya penataan pasar rakyat yang berkelanjutan. Namun meskipun telah didukung oleh kebijakan dari pemerintah, berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut masih ditemukan, seperti halnya ketabatasan anggaran, proses lelang yang lambat, serta timbulnya resistensi dari sebagian pedagang terkait penerapan digitalisasi dalam transaksi.

Dengan menggabungkan pendekatan teoritis dari Van Meter dan Van Horn serta konsep revitalisasi pasar, maka diharapkan analisis terhadap kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya dapat menjadi lebih merata dan menyeluruh. Sehingga hal ini juga akan memungkinkan peneliti untuk menilai terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mengukur dampaknya terhadap peningkatan daya saing pasar tradisional di Tengah gempuran pasar modern.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami terkait proses kebijakan secara mendalam melalui pandangan para pelaksana dan penerima kebijakan di lapangan.

Lokasi penelitian berfokus pada beberapa pasar rakyat di Surabaya yang telah direvitalisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui PD Pasar Surya, dengan subjek penelitian terdiri dari pejabat PD Pasar Surya Kota Surabaya, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, pengelola pasar, para pedagang, serta pembeli.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung di pasar yang telah direvitalisasi, dokumentasi berupa dokumen resmi dan foto kegiatan observasi, serta studi literatur untuk memperkuat analisis teori. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta konfirmasi ulang (member check) kepada informan untuk memastikan terkait kebenaran data yang diperoleh.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Revitalisasi Pasar Rakyat di Kota Surabaya

Revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor perdagangan tradisional. Kebijakan ini secara resmi dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pada pentingnya pembaruan aspek fisik, manajerial ekonomi, dan sosial di lingkungan pasar. Program ini diimplementasikan secara langsung melalui PD Pasar Surya Surabaya dengan dukungan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya.

Proses revitalisasi pasar secara fisik mencakup pada perbaikan infrastruktur pasar, seperti halnya peremajaan atap, saluran drainase, lantai, area parker, perluasan lorong, serta fasilitas sanitasi. Beberapa pasar lainnya seperti Pasar Kembang dan Pasar Nambangan telah mengalami peningkatan dari segi kebersihan, pencahayaan, dan ventilasi. Sehingga hal ini turut berdampak pada kenyamanan pembeli serta untuk mendukung standar Kesehatan dan keamanan di lingkungan pasar.



Dari sisi manajerial sendiri, PD Pasar Surya Surabaya mulai menerapkan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui digitalisasi data, penerapan sistem sewa berbasis kontrak, serta pelatihan pengelola pasar terkait pelayanan dan administrasi. Meskipun penerapannya tergolong belum merata ke seluruh pasar, tetapi perubahan ini telah menunjukkan komitmen menuju tata Kelola pasar yang lebih profesional.

Secara ekonomi, program revitalisasi pasar ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik pasar saja, tetapi juga mencakup terkait peningkatan dalam aspek manajerial, ekonomi, dan sosial budaya guna meningkatkan daya saing pasar terhadap retail modern. Dengan adanya program revitalisasi pasar ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan omzet pedagang hingga 20% dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengunjung pasar, sehingga program ini cukup berperan penting dalam memperkuat kegiatan ekonomi yang berbasis masyarakat (Kementerian Kominfo 2019). Hal ini terbukti dari pernyataan beberapa pedagang yang mengaku mengalami kenaikan omzet setelah pasar tempat mereka berjualan direnovasi. Selain itu, penyediaan kios-kios baru dalam program ini juga turut serta membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk memperluas jangkauan usaha mereka di pasar rakyat.

Namun masih terdapat tantangan lain dalam revitalisasi ini, seperti halnya dampak ekonomi dari revitalisasi pasar yang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pelaksana kebijakan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Ibu Saroh, selaku salah satu pedagang di Pasar Kembang Surabaya, yang menyampaikan bahwa:

“Terkait adanya program revitalisasi pasar ini kami sudah merasakan dampak yang cukup baik secara langsung. Namun, terkait faktor ekonomi seperti kenaikan omzet itu tergantung pada kondisi. Sekarang kondisi perekonomian Indonesia memang seperti ini, jadi bukan pengaruh dari pedagangnya atau dari program revitalisasi ini, tapi lebih karena krisis global yang sedang berlangsung.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi dalam meningkatkan omzet pedagang tidak dapat dilihat secara Tunggal dari aspek kebijakan lokal saja, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional maupun global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada intervensi fisik saja, tetapi juga memperkuat dukungan jangka panjang seperti pelatihan manajemen usaha, akses pembiayaan, serta promosi produk lokal. Adapun Gambaran lebih lanjut mengenai kondisi lapangan dapat dilihat melalui dokumentasi wawancara dengan Ibu Saroh di lokasi Pasar Kembang Surabaya berikut:



Dari aspek sosial, revitalisasi turut membentuk kembali pola interaksi antara pedagang dan pembeli. Dengan adanya pasar yang lebih tertata membuat aktivitas jual beli menjadi lebih nyaman, kemudian dengan pengadaan musholla juga dapat memperkuat ikatan sosial lain antara pedagang. Pada beberapa lokasi pasar juga telah terbentuk komunitas pedagang yang turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar, sekaligus menjadi mitra pengelola dalam mengidentifikasi terkait kebutuhan dan masalah yang terjadi di lapangan.

Revitalisasi ini juga tidak luput dari adanya peran pemerintah dalam proses revitalisasi yang sangat sentral, baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun pengawasan teknis. Hal ini juga turut didukung oleh PD Pasar Surya Surabaya yang bertindak sebagai pelaksana utama di lapangan dan bertanggung jawab mulai dari perencanaan renovasi hingga pengelolaan pasca revitalisasi. Sementara itu, komunitas pedagang juga turut mengambil peran penting sebagai penerima manfaat sekaligus penggerak keberlanjutan pasar. Kolaborasi antara ketiga unsur tersebut menjadi kunci keberhasilan dari revitalisasi, meskipun pada beberapa kasus masih ditemukan hambatan pada komunikasi dan perbedaan kepentingan yang memerlukan pendekatan partisipatif lebih kuat.

Efektivitas Implementasi Kebijakan Revitalisasi

Implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya menunjukkan efektivitas yang beragam, tergantung pada kesiapan infrastruktur, kualitas koordinasi antar lembaga, serta tingkat partisipasi para pedagang. berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, implementasi kebijakan telah berhasil meningkatkan kualitas fisik dan tata kelola pada sejumlah pasar, seperti Pasar Kembang dan Pasar Karah Baru. Pasar-pasar tersebut setelah mengalami revitalisasi, kini terbukti tidak hanya bersih dan tertata, tetapi juga menunjukkan peningkatan pada jumlah kunjungan konsumen serta pertumbuhan omzet pedagang yang cukup signifikan.

Namun efektivitas kebijakan revitalisasi di Kota Surabaya belum sepenuhnya merata di seluruh lokasi pasar. Beberapa pasar yang mengalami revitalisasi fisik masih menghadapi persoalan dalam aspek manajerial dan operasional, contohnya seperti ketidaksesuaian jadwal sewa, ketidakjelasan sistem kontrak, serta keterbatasan pelatihan pasca revitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak cukup jika hanya menasar pada pembaruan infrastruktur pasar tanpa disertai dengan penguatan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang adaptif. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas dalam implementasi kebijakan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan tujuan yang jelas sebagaimana seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023. Namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, seperti halnya adanya keterlambatan pada proses lelang yang turut berdampak pada mundurnya jadwal revitalisasi pasar. Selain itu, beban retribusi pada beberapa pasar yang mengalami peningkatan pasca revitalisasi turut menjadi hal yang dikeluhkan oleh para pedagang karena dinilai belum sebanding dengan keuntungan yang diperoleh.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam revitalisasi juga turut memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas implementasinya. Pihak pelaksana dari PD Pasar Surya maupun Dinkopdag telah menunjukkan komitmen yang cukup baik, hal ini dapat dilihat melalui adanya sosialisasi kebijakan, pemfasilitasian pelatihan pedagang, serta pengawasan di lapangan. Meski demikian, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang tinggi pada instansi juga turut menjadi hambatan tersendiri, terutama dalam hal pengawasan berkala terhadap pasar-pasar yang telah direvitalisasi.

3. Koordinasi Antar Pelaksana

Sikap pelaksana terhadap kebijakan secara umum terbilang cukup positif. Akan tetapi adanya kendala komunikasi antar organisasi pelaksana terkadang menjadi hambatan dalam proses koordinasi teknis, misalnya dalam hal pengadaan fasilitas pasar atau penanganan aduan pedagang. minimnya forum koordinasi antara pemerintah, pihak pengelola pasar, dan komunitas pedagang menyebabkan munculnya asumsi dan ekspektasi yang tidak selaras, terutama terkait hak dan kewajiban pasca revitalisasi.

4. Faktor Eksternal

Dari segi lingkungan eksternal, dukungan masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal tergolong cukup kondusif untuk mendorong keberhasilan revitalisasi pasar. Namun tekanan dari pasar modern yang terus berkembang dan menawarkan kenyamanan lebih, memaksa pasar rakyat untuk terus berinovasi. Oleh karena itu, strategi revitalisasi ke depannya masih perlu mengakomodasi unsur digitalisasi, diversifikasi produk lokal, serta penguatan branding pasar rakyat sebagai pusat ekonomi yang berbasis komunitas.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pasar di Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik, meskipun belum optimal secara menyeluruh. Keberhasilan program revitalisasi juga sangat bergantung pada sinergi antar kebijakan pemerintah, profesionalisme pengelola pasar, dan kesiapan adaptasi pedagang terhadap perubahan yang terjadi pasca revitalisasi. Sehingga hal ini masih memerlukan strategi yang lebih terintegrasi dan partisipatif agar revitalisasi tidak berhenti pada aspek pembangunan fisik saja, melainkan juga turut berdampak pada penguatan daya saing pasar rakyat yang berkelanjutan.

Peran dan Kontribusi Lembaga Pelaksana (PD Pasar Surya dan Dinkopdag Surabaya)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PD Pasar Surya Surabaya memiliki peran sentral sebagai pelaksana teknis utama dalam pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya. Tugas utama PD Pasar Surya meliputi pelaksanaan renovasi fisik pasar, penataan ulang kios pedagang, serta pengelolaan operasional harian di pasar-pasar yang telah direvitalisasi. Dengan kata lain PD Pasar Surya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perbaikan infrastruktur dan penataan lingkungan pasar telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, PD Pasar Surya juga berperan dalam menjaga kelancaran aktivitas pasar sehari-hari pasca revitalisasi, sehingga kondisi pasar tetap kondusif dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

Disisi lain Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya lebih berfokus pada perannya sebagai aspek regulasi dan kebijakan. Dinkopdag bertugas dalam merumuskan kebijakan strategis terkait revitalisasi pasar rakyat, menyusun regulasi yang mendukung pengelolaan pasar rakyat, serta memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada para pedagang agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi setelah revitalisasi. Selain itu Dinkopdag juga berperan dalam melakukan sosialisasi kebijakan serta mengkoordinasikan terkait program-program pemberdayaan pedagang guna meningkatkan daya saing pasar rakyat di Tengah persaingan dengan pasar modern.

Dalam pelaksanaannya, PD Pasar Surya menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah personel di lapangan yang menyebabkan pengawasan di beberapa pasar belum berjalan maksimal. Beban kerja yang cukup tinggi juga menjadi kendala tersendiri, sehingga pengelolaan dan pemantauan pasar secara berkala belum dapat dilakukan secara merata di seluruh pasar yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar Surya. Disisi lain, Dinkopdag juga menghadapi hambatan, seperti sulitnya koordinasi antar instansi terkait serta adanya keterlambatan dalam

proses pengalokasian anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi kebijakan kepada pedagang.

Jika dibuat perbandingan antara pasar yang dikelola langsung oleh PD Pasar Surya cenderung lebih terfokus pada aspek teknis dan operasional harian, sedangkan pasar yang berada di bawah naungan Dinkopdag lebih banyak mendapatkan perhatian pada aspek regulasi, pelatihan, serta pengembangan kapasitas pedagang. Adanya perbedaan pada peran kedua instansi ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kedua Lembaga tersebut, baik dalam hal pelaksanaan teknis maupun penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dari program revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya. Untuk memperjelas terkait perbedaan peran, kegiatan utama, tantangan, serta kontribusi antara PD Pasar Surya dan Dinkopdag Surabaya dalam implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat, berikut akan disajikan terkait tabel perbandingan antara kedua Lembaga tersebut:

Aspek	PD Pasar Surya	Dinkopdag Surabaya
Fungsi Utama	Sebagai pelaksana teknis revitalisasi pasar.	Sebagai regulator dan pengawas revitalisasi.
Kegiatan Utama	Lebih berfokus pada aspek renovasi dan pengelolaan pasar.	Berfokus pada sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan pedagang.
Tantangan	Keterbatasan SDM dan pengawasan pasar.	Koordinasi lintas instansi dan komunikasi dengan pihak ketiga/eksternal.
Kontribusi ke Efektivitas	Lebih tinggi di level teknis.	Lebih tinggi di level kebijakan dan pelatihan.

Berdasarkan olahan data peneliti yang didapat melalui hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang telah disajikan pada Tabel 4.1 di atas terlihat bahwa PD Pasar Surya lebih lebih dominan dalam aspek teknis dan pengelolaan operasional harian pasar, sedangkan Dinkopdag Surabaya lebih berfokus pada penerapan kebijakan revitalisasi pasar, pelatihan pedagang, serta pengawasan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan sesuai table yang disajikan diatas bahwa sinergi antara kedua lembaga tersebut sangat penting dan berpengaruh pada proses revitalisasi pasar rakyat di Surabaya agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari analisis efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa keberhasilan revitalisasi tidak hanya bergantung pada perubahan fisik bangunan semata, melainkan juga ditentukan oleh kemampuan pengelolaan, partisipasi pedagang, serta keberlanjutan dukungan regulative dari pemerintah daerah. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan revitalisasi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih mendalam dan partisipatif dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi lokal serta kapasitas adaptasi pulau pasar.

Dalam konteks penguatan daya saing pasar rakyat, revitalisasi seharusnya tidak hanya dimakanai sebagai proyek infrastruktur semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis komunitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjadikan pasar rakyat sebagai pusat aktivitas ekonomi inklusif yang mampu menjawab tantangan persaingan dengan pasar modern. Hal ini dapat dimulai melalui perbaikan pada sistem manajemen pasar yang lebih responsif, penyederhanaan pada proses perizinan, hingga fasilitasi pembiayaan usaha bagi pedagang kecil dan menengah. Rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk memperkuat implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan koordinasi antara PD Pasar Surya, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, serta komunitas pedagang melalui forum komunikasi berkala untuk menyalurkan kebutuhan lapangan dengan kebijakan yang diambil. Langkah ini juga dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi serta penyelesaian permasalahan teknis secara lebih cepat dan terukur.
2. Pemerintah daerah disarankan untuk memperluas program pelatihan berbasis digitalisasi dan manajemen usaha bagi para pedagang di pasar rakyat. Peningkatan kapasitas ini bertujuan agar para pedagang dapat beradaptasi dengan sistem transaksi elektronik, e-retribusi, serta pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk secara lebih luas.
3. Evaluasi berkala terhadap dampak revitalisasi perlu dilakukan tidak hanya dari sisi fisik dan ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan kultural. Pasar rakyat merupakan ruang interaksi sosial yang memiliki nilai budaya lokal, sehingga transformasi yang terjadi tidak boleh menghilangkan karakter asli pasar sebagai pusat ekonomi rakyat yang ramah, terbuka, dan akrab dengan lingkungan sekitarnya.
4. Diperlukan kebijakan insentif bagi pedagang yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri pasca revitalisasi, baik dalam bentuk keringanan retribusi, prioritas dalam pengelolaan kios, maupun bantuan promosi. Kebijakan ini penting untuk mendorong semangat kewirausahaan serta mempercepat proses pemulihan ekonomi di kalangan pedagang kecil.
5. Aspek keberlanjutan juga perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses revitalisasi pasar rakyat. Desain pasar yang ramah lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang baik, serta penggunaan energi terbarukan perlu mulai diterapkan secara bertahap agar pasar rakyat tidak hanya mampu bersaing dalam jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan sebagai entitas ekonomi lokal yang berkelanjutan di masa depan.

Melalui rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat di Kota Surabaya dapat semakin optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing pasar rakyat secara menyeluruh. Kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata di masyarakat dan didukung oleh manajemen yang adaptif akan menjadi kunci dalam mewujudkan pasar rakyat yang inklusif, modern, serta berdaya saing tinggi.

E. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi pasar rakyat dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil temuan di lapangan serta analisis terhadap implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pasar rakyat telah memberikan dampak positif, khususnya dalam perbaikan infrastruktur fisik, peningkatan kenyamanan lingkungan pasar, dan pertumbuhan omzet pedagang pada beberapa lokasi pasar yang telah direvitalisasi. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut belum merata pada seluruh pasar yang menjadi sasaran program revitalisasi. Masih terdapat sejumlah kendala seperti beban retribusi yang meningkat, keterlamabatan proses lelang, serta belum optimalnya adaptasi pedagang terhadap sistem pengelolaan baru dan digitalisasi dalam transaksi. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa revitalisasi belum sepenuhnya menyentuh aspek manajerial, sosial, dan pemberdayaan secara menyeluruh.

Keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, serta komunitas pedagang. partisipasi aktif antara seluruh pemangku kepentingan, ditambah dengan penguatan kapasitas manajemen dan dukungan regulasi yang adaptif merupakan faktor kunci dalam membangun pasar rakyat yang mampu bersaing secara berkelanjutan. Oleh karena itu, revitalisasi pasar rakyat kedepannya perlu dirancang sebagai strategi pembangunan jangka Panjang yang tidak hanya mengandalkan pada pendekatan fisik saja, tetapi juga turut memperkuat dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Dengan demikian, pasar rakyat tidak hanya dapat bertahan dalam persaingan dengan pasar modern, tetapi juga mampu berkembang sebagai ruang ekonomi komunitas yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Galuh Oktavina - 12704. 2021. "Tinjauan Umum Pasar Tradisional." *Redesain Pasar Tradisional Jongke, Surakarta* 2:1–28.
- Ii, B. A. B. 2020. "Tinjauan Pasar Sejarah Perkembangan Pasar Rakyat Definisi Pasar Rakyat." 18–38.
- Kementerian Kominfo, TA. 2019. "Kemendag Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan." *Kementerian Komunikasi Dan Informatika* 16544.
- Nasional, Pembangunan, Cara Penyusunan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi Pelaksanaan, Rencana Pembangunan, and Rencana Kerja Pemerintah. 2020. "Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur." 2017:1–17.
- Pasar, Revitalisasi, Tradisional Melalui, Optimalisasi Layanan, Pada Pasar, Kembang Surabaya, Achmad Bahul, and Sri Kamariyah. 2024. "Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Optimalisasi Layanan Pada Pasar Kembang Surabaya Achmad Bahul, Sri Kamariyah SAP – Vol. 2 No. 2 Tahun 2024." 2(2):495–502.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. "Perkembangan Pasar Tradisional Di Indonesia." *Journal GEEJ* 7(2):1–11.
- Raviansyah dkk. 2022. *Kebijakan Publik*.

- Rohmadani, Shafira, and Suci Megawati. 2022. "Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Nambangan Di Kota Surabaya." *Publika* 9:297–308. doi: 10.26740/publika.v10n1.p297-308.
- Rohman, Abd, and Dewi Citra Larasati. 2023. "Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional." *Anterior Jurnal* 22(2):69–75. doi: 10.33084/anterior.v22i2.4597.
- Salsabila, Elsa, Teguh Virgiawan, Rifky Ardiansyah, and Joni Hendra. 2024. "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Daerah Kecamatan Bengkalis The Role of Traditional Markets in Improving the Economy of the Community in Bengkalis District." 7(12):4682–88. doi: 10.56338/jks.v7i12.6621.